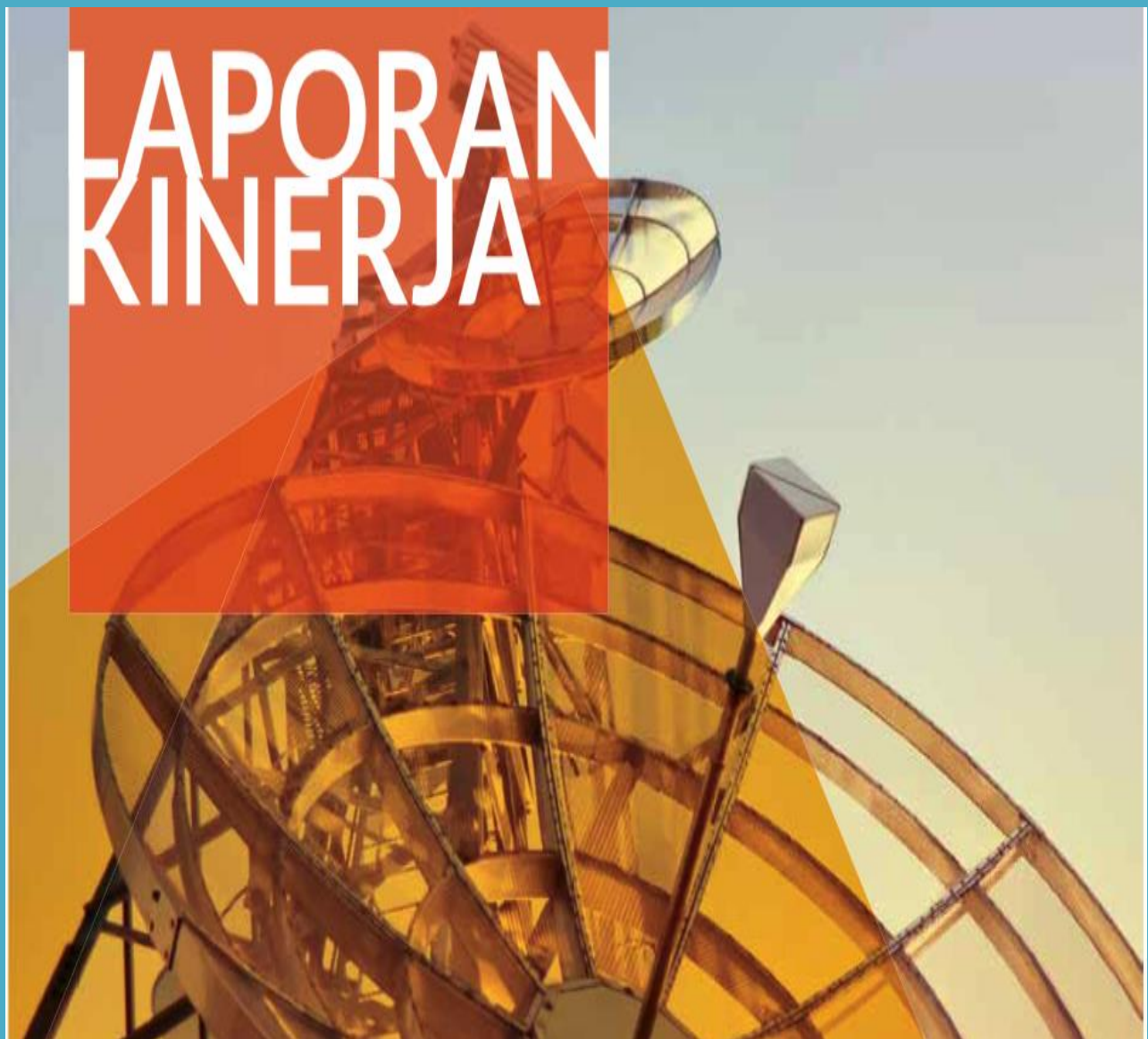


LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
(LAKIN)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024



KABUPATEN BANGKA
2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EKSEKUTIF SUMMARY	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. ASPEK STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	16
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
D. LANDASAN HUKUM	16
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIN TAHUN 2024	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	19
B. TUJUAN DAN SASARAN	21
C. STRATEGI,KEBIJAKAN,INDIKATOR SASARAN,PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM	21
D. OUTPUT/OUTCOME HASIL TAHUN 2024 YANG INGIN DICAPAI MENGACU KEPADA PERJANJIAN KINERJA YANG SUDAH DITETAPKAN DIAWAL TAHUN ANGGARAN 2024.....	26
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA	27
F. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA OPD	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
B. REALISASI ANGGARAN.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	48
B. HAMBATAN KENDALA	49
C. PEMECAHAN MASALAH.....	49
LAMPIRAN	
- LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024	
- PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	

KATA PENGANTAR

Amanat ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999 menghendaki penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditindak lanjuti dengan dengan Intruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan sumberdaya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditentukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 disusun guna memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan selama periode APBD 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan berupa saran, tanggapan dan pendapat sangat kami harapkan

Akhirnya dengan diiringi niat tulus dan senantiasa memohon Ridho-Nya semoga LAKIN ini dapat menjadi bahan pengendalian dari aspek manajemn pemerintahan yang akuntabel dalam rangka mewujudkan *Good Goverment* dan *Clean Goverment*

Sungailiat, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



Dian Firnandy, SE

NIP. 19791218 200804 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Penyusunan LAKIN Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, agar dapat berjalan dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal. Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat membutuhkan mekanisme yang sistematis dan terukur untuk dapat menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan pelayanan masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, agar dapat berjalan dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka dan Penetapan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka hal ini mengacu pada beberapa kebijakan-kebijakan akan penanaman modal yang tercantum dalam :

- a. UU No.25 Tahun 2007 pasal 4 meliputi upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dalam rangka penguatan daya saing perekonomian Nasional yaitu mempercepat peningkatan penanaman modal serta memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang telah melakukan pembagian urusan pemerintahan kepada Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal.

1.1. Sumber Daya Aparatur.

Untuk melaksanakan visi dan misi organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka di dukung struktur dan aparatur, yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas, membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu koperasi usaha kecil dan menengah.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, barang, perlengkapan, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, hubungan masyarakat, informasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Jabatan Fungsional Perencana;
- c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

3. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan perizinan satu pintu serta survey lapangan di Bidang Pelayanan Perizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda;

4. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;

5. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Pengawas Koperasin Ahli Muda;
- b. Analis Kebijakan

6. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Pranata Komputer Ahli Muda;
- b. Pranata Humas.

Jumlah PNS pada Jabatan Struktural dan Staf : 62 orang

- Kepala Dinas = 1 orang
- Sekretaris = 1 orang
- Kepala Bidang = 4 orang
- Jabatan Struktural = 1 Orang
- Jabatan Fungsional = 15 orang
- PPPK = 4 orang
- Fungsional Umum = 10 orang
- Tenaga kontrak = 26 orang

1.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas operasional, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah memiliki prasarana dan sarana kerja sebagaimana terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2024

Spesifikasi Barang			Tahun Perolehan	Ukuran Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
No Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type								
1	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	2007	2531 M2	Bidang	B	1	Rp 114.176.000,00	Rp 114.176.000,00	
2	Portable Generating Set	Perkins	2009	30 KVA	Unit	B	1	Rp 149.000.000,00	Rp 149.000.000,00	-
3	Station Wagon	Toyota/Avanza	2010	-	Unit	B	1	Rp 141.100.000,00	Rp 141.100.000,00	Peralihan dari Korpri 2016 BN 1501 QZ/ BN 2076 BZ

4	Station Wagon	Daihatsu Xenia M/T	2008	1298 cc	Unit	B	1	Rp 106.000.000,00	Rp 106.000.000,00	BN 2135 BZ / BN 1637 QZ
5	Station Wagon	Toyota/Avanza	2009	-	Unit	B	1	Rp 143.000.000,00	Rp 143.000.000,00	BN 1061 BZ (Peralihan dari BPM 2015) / BN 1635 QZ
6	Station Wagon	Toyota New Avanza Veloz	2012	1500 cc	unit	B	1	Rp 172.190.000,00	Rp 172.190.000,00	BN 2803 BZ- BN 1552 QZ / BN 1636 QZ
7	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5612 BZ / BN 5318 QZ
8	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5585 BZ / BN 5316 QZ
9	Sepeda Motor	Honda/NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5599 BZ/ BN 5314 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
10	Sepeda Motor	Honda/NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5565 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
11	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5698 BZ / BN 5572 QZ
12	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5699 BZ / BN 5566 QZ/ BN 5895 QZ
13	Sepeda Motor	Jupiter Z1	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.000,00	Rp 14.949.000,00	BN 2014 QZ (Peralihan dari BPM 2015) BN 5747 QZ
14	Sepeda Motor	Jupiter Z1	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.000,00	Rp 14.949.000,00	BN 2007 QZ (Peralihan dari BPM 2015) BN 5748 QZ
15	Sepeda Motor	Jupiter Z1	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.200,00	Rp 14.949.200,00	BN 2013 QZ (Peralihan dari BPM 2015) BN 5746 QZ
16	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Meteran otomatis merk Sanfix SD-100a Laser distance meter	2015	-	Unit	B	1	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00	-
17	Radiation Monitor Isotropic	intel instrument plus	2014	30-300 Hz	Unit	B	1	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-
18	Global Positioning System	Garmin Montana 650	2013	-	Unit	B	2	Rp 6.975.000,00	Rp 13.950.000,00	-
19	alat ukur universal lainnya (dst)	Fluke 1621	2014	-	Unit	B	1	Rp 17.000.000,00	Rp 17.000.000,00	-
20	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Olivetti Linga 98"	2008	-	Unit	B	1	Rp 4.264.200,00	Rp 4.264.200,00	-
21	Lemari Besi/Metal	Brother	2007	-	Unit	B	6	Rp 1.935.990,00	Rp 11.615.940,00	-

22	Lemari Besi/Metal	Brother	2010	-	Unit	B	2	Rp 2.248.000,00	Rp 4.496.000,00	Peralihan dari BPM 2015
23	Rak Besi	-	2015	30x30	Unit	B	3	Rp 6.650.000,00	Rp 19.950.000,00	
24	Rak Kayu	Standar	2009	-	Unit	B	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	-
25	Rak Kayu	Standar	2009	-	Unit	B	1	Rp 2.480.000,00	Rp 2.480.000,00	-
26	Rak Kayu	Standar	2011	-	Unit	B	2	Rp 3.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-
27	Rak Kayu	Standar	2014	-	Unit	B	2	Rp 7.500.000,00	Rp 15.000.000,00	-
28	Filing Cabinet Besi	Brother	2007	-	Unit	B	10	Rp 1.494.990,00	Rp 14.949.900,00	-
29	Filing Cabinet Besi	Elite	2008	-	Unit	B	10	Rp 1.853.073,00	Rp 18.530.730,00	-
30	Filing Cabinet Besi	Yunika	2008	-	Unit	B	10	Rp 1.816.920,00	Rp 18.169.200,00	Peralihan dari BPM 2015
31	Filing Cabinet Besi	Brother	2014	-	Unit	B	4	Rp 1.870.000,00	Rp 7.480.000,00	Peralihan dari BPM 2015
32	Brandkas	Ichiban	2007	-	Unit	B	1	Rp 4.630.500,00	Rp 4.630.500,00	-
33	Brandkas	-	2016	-	Unit	B	1	Rp 9.850.000,00	Rp 9.850.000,00	-
34	Lemari Kaca	Standar	2009	-	Unit	B	1	Rp 3.699.270,00	Rp 3.699.270,00	-
35	Lemari Kaca	Standar	2010	-	Unit	B	2	Rp 2.490.000,00	Rp 4.980.000,00	-
36	Lemari Kaca	Berdiri (2 pintu)	2015	180x90	Unit	B	1	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00	
37	Lemari Kaca	Memanjang (geser)	2015	100x200	Unit	B	1	Rp 2.900.000,00	Rp 2.900.000,00	
38	Papan Visual/Papan Nama	Standar	2009	-	Unit	B	2	Rp 1.600.000,00	Rp 3.200.000,00	-
39	Papan Visual/Papan Nama	-	2012	-	Unit	B	1	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Peralihan dari BPM 2015
40	Papan Visual/Papan Nama	-	2013	-	buah	B	5	Rp 70.000,00	Rp 350.000,00	-
41	Papan Visual/Papan Nama	-	2013	-	paket	B	1	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	-
42	Alat Penghancur Kertas	Secure	2016	-	Unit	B	1	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	-
43	White Board	Sakura	2007	-	Unit	B	2	Rp 1.318.590,00	Rp 2.637.180,00	-
44	White Board	Sakura	2008	-	Unit	B	3	Rp 731.403,00	Rp 2.194.209,00	-
45	White Board	-	2008	-	Unit	B	1	Rp 1.390.500,00	Rp 1.390.500,00	Peralihan dari BPM 2015
46	Alat Kantor Lainnya	-	2013	-	buah	B	1	Rp 170.000,00	Rp 170.000,00	-
47	Alat Kantor Lainnya	-	2013	-	roll	B	12	Rp 400.000,00	Rp 4.800.000,00	-
48	Lemari Kayu	Elite	2008	-	Unit	B	7	Rp 834.300,00	Rp 5.840.100,00	-
49	Lemari Kayu	Brother	2011	-	Unit	B	2	Rp 3.499.250,00	Rp 6.998.500,00	-
50	Lemari Kayu	-	2012	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
51	Lemari Kayu	-	2012	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
52	Meja Kerja Kayu	-	2014	-	Unit	B	4	Rp 600.000,00	Rp 2.400.000,00	Peralihan dari BPM 2015
53	Kursi Besi/Metal	Brother	2014	-	Unit	B	10	Rp 770.000,00	Rp 7.700.000,00	-
54	Meja Rapat	Modera/besar	2008	510x270 x60	Set	B	1	Rp 1.494.082,98	Rp 1.494.082,98	-

55	Meja Rapat	Glory Import/kecil	2008	360x150 x74 cm	Unit	B	1	Rp 12.699.900,00	Rp 12.699.900,00	-
56	Meja Rapat	Standart	2009	-	set	B	1	Rp 5.550.000,00	Rp 5.550.000,00	Peralihan dari BPM 2015
57	Meja 1/2 Biro	Glory	2007	122x77x 74 cm	Unit	B	29	Rp 1.058.400,00	Rp 30.693.600,00	-
58	Meja 1/2 Biro	Glory	2007	154x77x 74 cm	Unit	B	1	Rp 1.146.600,00	Rp 1.146.600,00	-
59	Meja 1/2 Biro	Glory	2008	122x70x 74 cm	Unit	B	5	Rp 880.650,00	Rp 4.403.250,00	-
60	Meja 1/2 Biro	Orbitren	2008	-	Unit	B	10	Rp 876.015,00	Rp 8.760.150,00	Peralihan dari BPM 2015
61	Meja 1/2 Biro	Sbitrend	2008	-	Unit	B	3	Rp 1.371.960,00	Rp 4.115.880,00	Peralihan dari BPM 2015
62	Meja Panjang	Standar kayu	2009	3x0,70	Unit	B	1	Rp 990.000,00	Rp 990.000,00	-
63	Meja Panjang	Fortune	2013	-	Set	B	1	Rp 23.557.500,00	Rp 23.557.500,00	-
64	Kursi Rapat	-	2008	-	Unit	B	54	Rp 185.400,00	Rp 10.011.600,00	-
65	Kursi Rapat	Fortuner	2009	-	Unit	B	9	Rp 497.000,00	Rp 4.473.000,00	Peralihan dari BPM 2015
66	Kursi Putar	Fantoni	2007	-	Unit	B	6	Rp 970.200,00	Rp 5.821.200,00	-
67	Kursi Putar	Junior	2008	-	Unit	B	2	Rp 463.500,00	Rp 927.000,00	-
68	Kursi Putar	-	2014	-	Unit	B	2	Rp 400.000,00	Rp 800.000,00	Peralihan dari BPM 2015
69	Bangku Tunggu	Rakuda	2009	-	Unit	B	4	Rp 2.460.000,00	Rp 9.840.000,00	-
70	Bangku Tunggu	4 dudukan	2016	-	Unit	B	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Hibah dari Dinkes
71	Meja Komputer	Glory/SP- 208	2009	-	Unit	B	4	Rp 272.500,00	Rp 1.090.000,00	-
72	Meja Komputer	Aktif /Ct- 1209 G	2010	-	Unit	B	2	Rp 1.480.000,00	Rp 2.960.000,00	-
73	Sofa	Golden	2008	-	Unit	B	1	Rp 22.711.500,00	Rp 22.711.500,00	-
74	Sofa	Standart	2009	-	set	B	1	Rp 4.450.000,00	Rp 4.450.000,00	Peralihan dari BPM 2015
75	Sofa	Standar	2014	-	Unit	B	1	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-
76	Meubeleur lainnya	Standar	2009	-	Unit	B	1	Rp 145.000,00	Rp 145.000,00	-
77	Meubeleur lainnya	-	2016	130X70 CM	Unit	B	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Hibah dari Dinkes
78	Mesin Pemotong Rumput	STIHL	2016	-	Unit	B	1	Rp 2.850.000,00	Rp 2.850.000,00	-
79	A.C. Window	Panasonic	2008	-	Unit	B	3	Rp 4.635.000,00	Rp 13.905.000,00	-
80	A.C. Window	Panasonic	2008	-	Unit	B	2	Rp 7.416.000,00	Rp 14.832.000,00	-
81	A.C. Window	Panasonic	2009	-	Unit	B	4	Rp 4.490.000,00	Rp 17.960.000,00	-
82	A.C. Window	Panasonic	2009	-	Unit	B	1	Rp 11.975.000,00	Rp 11.975.000,00	-
83	A.C. Window	Akira	2013	-	Unit	B	1	Rp 13.300.000,00	Rp 13.300.000,00	-
84	Exhaust Fan	Panasonic	2009	-	Unit	B	3	Rp 497.500,00	Rp 1.492.500,00	-
85	Kompas Gas (Alat Dapur)	Rinai	2008	-	Unit	B	1	Rp 556.200,00	Rp 556.200,00	-
86	Tabung Gas	Pertamina	2008	-	Unit	B	1	Rp 741.600,00	Rp 741.600,00	-
87	Televisi	Toshiba	2007	-	Unit	B	1	Rp 2.416.680,00	Rp 2.416.680,00	-
88	Televisi	Polytron PLM 40M53	2013	-	inch	B	1	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	-

89	Wireless	TOA	2012	-	Unit	B	1	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
90	Unit Power Supply	Bravo	2007	-	Unit	B	2	Rp 661.500,00	Rp 1.323.000,00	-
91	Unit Power Supply	Prolink	2008	-	Unit	B	1	Rp 695.250,00	Rp 695.250,00	Peralihan dari BPM 2015
92	Unit Power Supply	Prolink	2009	-	Unit	B	3	Rp 847.500,00	Rp 2.542.500,00	-
93	Unit Power Supply	Bravo 600 PA APC SC 1000 Prolink	2010	-	Unit	B	2	Rp 1.189.750,00	Rp 2.379.500,00	-
94	Stabilisator	Matsui	2007	-	Unit	B	3	Rp 308.700,00	Rp 926.100,00	-
95	Camera Video	Canon Ixus	2013	-	Unit	B	1	Rp 1.980.000,00	Rp 1.980.000,00	-
96	Camera Video	Infinity/DV- 3104	2014	-	Unit	B	1	Rp 7.300.000,00	Rp 7.300.000,00	-
97	Camera film	Nikon	2008	-	Unit	B	1	Rp 4.634.073,00	Rp 4.634.073,00	-
98	Camera film	Nikon D 3100	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
99	Tangga Aluminium	Indalex R	2009	-	Unit	B	1	Rp 445.000,00	Rp 445.000,00	-
100	Dispenser	Miyako	2007	-	Unit	B	1	Rp 308.700,00	Rp 308.700,00	-
101	Dispenser	Miyako	2007	-	Unit	B	1	Rp 868.770,00	Rp 868.770,00	-
102	Handy Cam	Sony	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Peralihan dari BPM 2015
103	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2014	-	Unit	B	1	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-
104	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Jupiter	2014	-	Unit	B	8	Rp 150.000,00	Rp 1.200.000,00	-
105	Mini Komputer	Samsung/P entium Core Duo	2010	-	Unit	B	1	Rp 14.925.000,00	Rp 14.925.000,00	Peralihan dari BPM 2015
106	P.C Unit	Samsung	2008	-	Unit	B	1	Rp 9.548.100,00	Rp 9.548.100,00	Peralihan dari BPM 2015
107	P.C Unit	Acer	2008	-	Unit	B	5	Rp 8.342.639,50	Rp 41.713.197,50	-
108	P.C Unit	Accer Aspire	2012	-	Unit	B	3	Rp 8.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
109	P.C Unit	HP PRO 3330	2014	-	Unit	B	3	Rp 7.803.125,00	Rp 23.409.375,00	Hibah dari BKPM RI
110	P.C Unit	HP + meja + UPS 700 VA	2016	-	Unit	B	4	Rp 9.500.000,00	Rp 38.000.000,00	-
111	Lap Top	Asus	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
112	Lap Top	Lenovo EDGE	2013	-	Unit	B	1	Rp 9.980.000,00	Rp 9.980.000,00	-
113	Lap Top	ASUS A455L	2015	-	Unit	B	2	Rp 7.283.333,33	Rp 14.566.666,67	-
114	Lap Top	Asus	2016	-	Unit	B	2	Rp 8.000.000,00	Rp 16.000.000,00	-
115	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2008	-	Unit	B	2	Rp 2.776.365,00	Rp 5.552.730,00	-
116	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer dotmatrik, Epson LQ 2190	2016	-	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	-
117	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Laserjet, HP Pro CP1025	2016	-	Unit	B	2	Rp 3.500.000,00	Rp 7.000.000,00	-

118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Infus, Epson L120	2016	-	Unit	B	2	Rp 2.150.000,00	Rp 4.300.000,00	-
119	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Canon Mx497	2016	-	Unit	B	1	Rp 2.150.000,00	Rp 2.150.000,00	-
120	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET M1132	2014	-	Unit	B	2	Rp 2.124.320,00	Rp 4.248.640,00	Hibah dari BKPM RI
121	Peralatan Personal Komputer lainnya	Rex patch cord	2014	-	Unit	B	1	Rp 39.570,00	Rp 39.570,00	Hibah dari BKPM RI
122	Server	IBM X3	2013	-	Unit	B	1	Rp 30.200.000,00	Rp 30.200.000,00	-
123	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni F- 4000	2007	-	Unit	B	1	Rp 2.116.800,00	Rp 2.116.800,00	-
124	Buffet Kayu	-	2014	-	Unit	B	4	Rp 3.050.000,00	Rp 12.200.000,00	Peralihan dari BPM 2015
125	Layar Film/Projec tor	Infocus	2010	-	Unit	B	1	Rp 9.485.000,00	Rp 9.485.000,00	Peralihan dari BPM 2015
126	Rollmeter	-	2007	-	Unit	B	1	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-
127	Noise Level Meter	Extech	2013	-	Unit	B	2	Rp 6.975.000,00	Rp 13.950.000,00	-
128	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2008	689,6 M2	Unit	B	1	Rp 1.610.400.000,00	Rp 1.610.400.000,00	Penilaian Aset 2013
129	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	2008	19,25 M2	Unit	B	1	Rp 30.266.400,00	Rp 30.266.400,00	Penilaian Aset 2013
130	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	-	2008	9,75 M2	Unit	B	1	Rp 26.630.000,00	Rp 26.630.000,00	Penilaian Aset 2013
131	Bangunan Tempat Kerja Lain- lain (dst)	-	2008	667 M2	Unit	B	1	Rp 81.356.400,00	Rp 81.356.400,00	Penilaian Aset 2013
132	Bangunan Tempat Kerja Lain- lain (dst)	-	2008	45 M2	Unit	B	1	Rp 16.950.000,00	Rp 16.950.000,00	Penilaian Aset 2013
133	Bangunan Tempat Kerja Lain- lain (dst)	-	2009	174 M2	Unit	B	1	Rp 184.769.000,00	Rp 184.769.000,00	Penilaian Aset 2013
134	Bangunan Tempat Kerja Lain- lain (dst)	-	2016	-	Unit	B	1	Rp 68.926.000,00	Rp 68.926.000,00	Hibah dari Dinkes
135	Bangunan Menara Telekomuni kasi Lain- lain (dst)	-	2013	30 M	Unit	B	1	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	-
136	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	-	2009	40 M2	Unit	B	1	Rp 53.379.924,00	Rp 53.379.924,00	-
137	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	-	2009	40 M2	Unit	B	1	Rp 13.729.176,00	Rp 13.729.176,00	-
138	Bangunan Penampun g Air Baku	-	2014	-	Unit	B	1	Rp 25.200.000,00	Rp 25.200.000,00	-

139	Instalasi Penangkal Petir Manual	-	2013	-	Unit	B	1	Rp 24.800.000,00	Rp 24.800.000,00	-
140	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	-	2008	-	Unit	B	2	Rp 1.854.000,00	Rp 3.708.000,00	-
141	Rak Kayu	Orbitrend	2008	-	Unit	B	1	Rp 1.826.190,00	Rp 1.826.190,00	Peralihan dari Perindagkop
142	Filing Cabinet Besi	Brother	2007	-	Unit	B	4	Rp 1.300.950,00	Rp 5.203.800,00	Peralihan dari Perindagkop
143	Filing Cabinet Besi	Brother	2008	-	Unit	B	4	Rp 1.369.642,50	Rp 5.478.570,00	Peralihan dari Perindagkop
144	Lemari Kayu	Brother	2011	-	Buah	B	1	Rp 3.172.500,00	Rp 3.172.500,00	Peralihan dari Perindagkop
145	P.C Unit	Samsung	2008	-	Unit	B	1	Rp 9.587.497,50	Rp 9.587.497,50	Peralihan dari Perindagkop
146	P.C Unit	Samsung	2011	-	Unit	B	1	Rp 10.400.000,00	Rp 10.400.000,00	Peralihan dari Perindagkop
147	Lap Top	Acer	2014	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari Perindagkop
148	Buffet Kayu	Brother	2003	-	Unit	B	1	Rp 1.940.400,00	Rp 1.940.400,00	Peralihan dari Perindagkop
149	P.C Unit	Lenovo	2016	-	Unit	B	1	Rp 6.700.000,00	Rp 6.700.000,00	Peralihan dari Perindagkop
150	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2016	-	Unit	B	1	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Peralihan dari Perindagkop
151	P.C Unit	HP	2019	-	Unit	B	6	Rp 9.362.500,00	Rp 56.175.000,00	Pengadaan 2019
152	Lap Top	Lenovo Yoga	2019	-	Unit	B	2	Rp 10.737.500,00	Rp 21.475.000,00	Pengadaan 2019
153	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet Pro MFP M227 sdn [G3Q74A]	2019	-	Unit	B	2	Rp 4.396.500,00	Rp 8.793.000,00	Pengadaan 2019
154	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110	2019	-	Unit	B	8	Rp 2.500.000,00	Rp 20.000.000,00	Pengadaan 2019
155	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Plustek Mobile Office S410	2019	-	Unit	B	2	Rp 2.296.500,00	Rp 4.593.000,00	Pengadaan 2019
156	Unit Power Supply	Fsp UPS EP FP600	2019	-	Unit	B	7	Rp 797.500,00	Rp 5.582.500,00	Pengadaan 2019
157	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	Vikacare	2019	-	Unit	B	1	Rp 1.715.000,00	Rp 1.715.000,00	Pengadaan 2019
158	Tensimeter	Omron	2019	-	Unit	B	1	Rp 473.000,00	Rp 473.000,00	Peralihan dari Dinkes 2019
159	Papan Visual/Papan Nama	-	2019	-	Unit	B	1	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Pengadaan 2019
160	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	-	2019	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Pengadaan 2019
161	Rollmeter	Rhino	2019	-	Unit	B	2	Rp 125.000,00	Rp 250.000,00	Pengadaan 2019
162	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Sanfix	2019	-	Unit	B	1	Rp 6.250.000,00	Rp 6.250.000,00	Pengadaan 2019
163	A.C. Window	Polytron	2020	-	Unit	B	1	Rp 11.600.000,00	Rp 11.600.000,00	Belanja Modal APBD 2020

164	Air Conditionin g (AC)	Sharp	2020	-	Unit	B	2	Rp 5.650.000,00	Rp 11.300.000,00	Belanja Modal APBD 2020
165	Termomete r Gun	Coolpad	2020	-	Unit	B	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	peralihan aset dari dinkes
166	Penyempro t Mesin (Power Sprayer)	Polar	2020	-	Unit	B	1	Rp 874.500,00	Rp 874.500,00	peralihan aset dari dinkes
167	Layar Film/Projec tor	Epson	2020	-	Unit	B	1	Rp 9.600.000,00	Rp 9.600.000,00	Belanja Modal APBD 2020
168	Meja 1/2 Biro	Modesty/G ST-1080	2020	-	Unit	B	10	Rp 1.850.000,00	Rp 18.500.000,00	Belanja Modal APBD 2020
169	Kursi Putar	type OC- 079	2020	-	Unit	B	10	Rp 825.000,00	Rp 8.250.000,00	Belanja Modal APBD 2020
170	Termomete r Gun	Coolpad	2021	-	Unit	B	1	Rp 366.666,00	Rp 366.666,00	peralihan aset dari BPBD
171	AC Split	Gree GWC- 18M005 2 PK	2021	-	Unit	B	1	Rp 7.074.000,00	Rp 7.074.000,00	Pengadaan 2021
172	Hardisk Eksternal	Hardisk Kapasitas 1 TB	2021	-	Unit	B	4	Rp 1.050.000,00	Rp 4.200.000,00	Pengadaan 2021
173	P.C Unit	Lenovo	2022	-	Unit	B	2	12.350.000,00	Rp 24.700.000,00	Pengadaan 2022
174	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L121 Inkjet	2022	-	Unit	B	2	2.400.000,00	Rp 4.800.000,00	Pengadaan 2022
175	P.C Unit	Lenovo	2022	-	Unit	B	3	9.899.979,00	29.699.937,00	Pengadaan 2022
176	Laptop	Lenovo	2022	-	Unit	B	2	23.115.750,00	46.231.500,00	Pengadaan 2022
177	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2022	-	Unit	B	3	4.440.000,00	13.320.000,00	Pengadaan 2022
178	Mesin Scanner	Canon	2022	-	Unit	B	3	987.456,00	2.962.368,00	Pengadaan 2022
179	AC Split	Panasonic	2022	-	Unit	B	6	5.200.000,00	31.200.000,00	Pengadaan 2022
180	Cool Box	Kapasitas 100 Liter	2022	-	Unit	B	1	1.200.000,00	1.200.000,00	Pengadaan 2022
181	Exhaust Fan	Panasonic	2022	-	Unit	B	2	834.000,00	1.668.000,00	Pengadaan 2022
182	Kipas Angin	Celling	2022	-	Unit	B	2	311.000,00	622.000,00	Pengadaan 2022
183	Alat Pemadam Kebakaran (Alat Pembantu Kebakaran)	Tabung Apar 6 kg Powder	2022	-	Unit	B	3	620.000,00	1.860.000,00	Pengadaan 2022
184	P.C Unit (Komputer)	ACER C22	2021	-	Unit	B	1	12.430.000,00	12.430.000,00	Hibah dari BKPM RI 2022
185	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA G3010	2021	-	Unit	B	1	2.985.400,00	2.985.400,00	Hibah dari BKPM RI 2022
186	Modem Wifi	ADVAN	2021	-	Unit	B	1	1.109.900,00	1.109.900,00	Hibah dari BKPM RI 2022
187	Mesin Antrian (Mesin Hitung/Mes in Jumlah Lainnya)	ONESIA	2022	-	Unit	B	1	62.160.000,00	62.160.000,00	Pengadaan 2022
188	Tanah Eks Pusat Kesehatan Masyarakat Sungailiat	-	1983	1508 M2	Bidang	B	1	699.712.000,00	699.712.000,00	Peralihan dari DINKES 2022

189	Pelayanan Puskesmas Sungailiat	-	2007	702 M2	Unit	B	1	2.364.557.846,62	2.364.557.846,62	Peralihan dari DINKES 2022
190	Bangunan Klinik/Pusk esmas/ Laboratoriu m	-	2014	-	Unit	B	1	1.057.181.000,00	1.057.181.000,00	Peralihan dari DINKES 2022
191	Pagar Gedung Puskesmas	-	2000	29 M2	Unit	B	1	22.153.064,20	22.153.064,20	Peralihan dari DINKES 2022
192	Perkerasan Halaman Puskesmas	-	2000	454 M2	Unit	B	1	36.748.800,00	36.748.800,00	Peralihan dari DINKES 2022
193	Selasar	-	2000	252 M2	Unit	B	1	399.168.000,00	399.168.000,00	Peralihan dari DINKES 2022
194	Mesin Genset	-	2012	-	Unit	KB	1	168.590.000,00	168.590.000,00	Peralihan dari BPPKAD 2022
195	Neon Box 3x1 Meter (Papan Nama Instansi)	-	2022	3x1 Meter	Unit	B	1	5.000.000,00	5.000.000,00	Peralihan dari BPPKAD 2023 (Hibah dari PT. Asia Surya Perkasa)
196	P.C Unit (Komputer)	Lenovo	2023	-	Unit	B	15	9.550.000,00	143.250.000,00	Pengadaan 2023
197	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laserjet Pro MFP M428fdn	2023	-	Unit	B	1	9.840.000,00	9.840.000,00	Pengadaan 2023
198	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon G2010	2023	-	Unit	B	14	3.080.000,00	43.120.000,00	Pengadaan 2023
199	Mesin Fotocopi	Canon	2023	-	Unit	B	1	44.000.000,00	44.000.000,00	Pengadaan 2023
200	Laptop	Lenovo	2023	-	Unit	B	2	12.650.000,00	25.300.000,00	Pengadaan 2023
201	Kulkas (Lemari Es)	LG	2023	-	Unit	B	1	2.950.000,00	2.950.000,00	Pengadaan 2023
202	Water Dispenser (Dispenser)	Polytron	2023	-	Unit	B	4	3.000.000,00	12.000.000,00	Pengadaan 2023
203	Televisi	Sharp, LED TV Ukuran 40"	2023	-	Unit	B	1	4.750.000,00	4.750.000,00	Pengadaan 2023
204	Alat Pemadam Kebakaran (Alat Pembantu Kebakaran) /Alat Pemadam (Portable)	Tabung Apar	2023	-	Unit	B	5	832.500,00	4.162.500,00	Pengadaan 2023
205	Running Teks	100 x 200 cm, Tulisan /Teks berjalan LED	2023	-	Unit	B	1	3.300.000,00	3.300.000,00	Pengadaan 2023
206	Kursi Front Office (Pelayanan)/ Mebeleur Lainnya	Indhaci seri javico IV COT	2023	-	Unit	B	1	525.000,00	525.000,00	Pengadaan 2023
207	Kursi Kerja (Kursi Putar)	Sandaran Berlapis Jaring Nylon	2023	-	Unit	B	1	1.195.000,00	1.195.000,00	Pengadaan 2023
208	Kursi Kerja (Kursi Biasa)	Futura	2023	-	Unit	B	3	670.000,00	2.010.000,00	Pengadaan 2023

209	Kursi Rapat	Brother (Warna Biru)	2023	-	Unit	B	24	500.000,00	12.000.000,00	Pengadaan 2023
210	Meja Rapat	400 cm x 120 cm x 75 cm	2023	-	Unit	B	1	14.000.000,00	14.000.000,00	Pengadaan 2023
211	Gorden (Gordyin/ Kray)	Kain Luar Bahan Blackout Desain dan Kain Dalam Berbahan Vitrace kain Voice	2023	-	Set	B	2	4.500.000,00	9.000.000,00	Pengadaan 2023
212	Mesin Absensi Elektronik (Finger Print)	-	2023	-	Unit	B	1	6.350.000,00	6.350.000,00	Peralihan dari DIKOMINFOTIK 2024
213	Kursi Rapat (kursi Kerja)	Brother	2024	-	Unit	B	50	546.000,00	27.300.000,00	Pengadaan 2024
214	Meja 1/2 Biro	Orbitren	2024	-	Unit	B	10	1.200.000,00	12.000.000,00	Pengadaan 2024
215	Kursi Kerja Eselon II	Ergotec	2024	-	Unit	B	1	4.500.000,00	4.500.000,00	Pengadaan 2024
216	Softwere (Aset Tidak Berwujud / Lisensi Template Website)	-	2024	-	Unit	B	1	19.702.000,00	19.702.000,00	Pengadaan 2024
217	Komputer PC (Advan)	Advan	2024	-	Unit	B	15	10.450.000,00	156.750.000,00	Pengadaan 2024
218	Ipad/Tablet S9 FE Plus 5G (Samsung)	Samsung	2024	-	Unit	B	5	12.470.000,00	62.350.000,00	Pengadaan 2024
219	Ipad/Tablet S9 Ultra (Samsung)	Samsung	2024	-	Unit	B	1	24.950.000,00	24.950.000,00	Pengadaan 2024
220	Laptop My Book Pro K5 (8N9) AXIO	AXIO	2024	-	Unit	B	2	15.100.000,00	30.200.000,00	Pengadaan 2024
221	Laptop My Book Pro K5 (8N2) AXIO	AXIO	2024	-	Unit	B	1	12.800.000,00	12.800.000,00	Pengadaan 2024
222	Bangunan Tempat Parkir	-	2024	-	Unit	B	1	19.133.095,00	19.133.095,00	Pengadaan 2024
223	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3250	2024	-	Unit	B	10	3.100.000,00	31.000.000,00	Pengadaan 2024
224	Kursi Kerja Eselon III	Importa	2024	-	Unit	B	1	3.900.000,00	3.900.000,00	Pengadaan 2024
225	Lemari Besi/Metal	Frontline	2024	-	Unit	B	1	4.600.000,00	4.600.000,00	Pengadaan 2024

226	Stabilizer	Toyosaki	2024	-	Unit	B	15	660.000,00	9.900.000,00	Pengadaan 2024
227	Tangga Aluminium	Tukuiki	2024	-	Unit	B	1	650.000,00	650.000,00	Pengadaan 2024
228	Jam Eletronik (Jam Dinding)	pionerr	2024	-	Unit	B	2	180.000,00	360.000,00	Pengadaan 2024
229	Loudspeaker	krezt	2024	-	Unit	B	1	4.890.000,00	4.890.000,00	Pengadaan 2024
230	Laptop	Acer Aspire	2024	-	Unit	B	1	12.400.000,00	12.400.000,00	Pengadaan 2024
231	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2024	-	Unit	B	1	2.550.000,00	2.550.000,00	Pengadaan 2024
232	AC Split	Panasonic	2024	-	Unit	B	1	4.950.000,00	4.950.000,00	Pengadaan 2024
233	Bel	Lucky	2024	-	Unit	B	1	150.000,00	150.000,00	Pengadaan 2024
234	Kipas Angin	Hero	2024	-	Unit	B	1	650.000,00	650.000,00	Pengadaan 2024
235	Exhaust Fan	Sekai	2024	-	Unit	B	5	800.000,00	4.000.000,00	Pengadaan 2024
236	AC Window (AC Floor 5 PK)	Daikin	2024	-	Unit	B	2	39.800.000,00	79.600.000,00	Pengadaan 2024
237	AC Split	Panasonic	2024	-	Unit	B	15	11.425.000,00	171.375.000,00	Pengadaan 2024
238	AC Split	Panasonic	2024	-	Unit	B	5	4.950.000,00	24.750.000,00	Pengadaan 2024
239	Sound System	Dusenberg	2024	-	set	B	1	17.850.000,00	17.850.000,00	Pengadaan 2024
240	Cctv - Camera Control Television System	Hikvision	2024	-	set	B	1	34.750.000,00	34.750.000,00	Pengadaan 2024
241	Papan Nama Instansi	-	2024	-	Unit	B	1	5.900.000,00	5.900.000,00	Pengadaan 2024
242	Kursi Front Office (Pelayanan)/ Mebeleur Lainnya	Inco	2024	-	Unit	B	80	870.000,00	69.600.000,00	Pengadaan 2024

243	Sofa	Brenelli	2024	-	Set	B	1	16.000.000,00	16.000.000,00	Pengadaan 2024
244	Sofa	-	2024	-	Unit	B	3	4.700.000,00	14.100.000,00	Pengadaan 2024
245	Meja Kerja Kayu	-	2024	-	Unit	B	2	2.350.000,00	4.700.000,00	Pengadaan 2024
246	Meja Kerja Kayu	-	2024	-	Unit	B	20	7.100.000,00	142.000.000,00	Pengadaan 2024
247	Meja Resepsionis	-	2024	-	Unit	B	1	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan 2024
248	Bangku Tunggu	-	2024	-	Unit	B	50	2.900.000,00	145.000.000,00	Pengadaan 2024
JUMLAH							892		10.724.259.578,47	

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

B. ASPEK STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka aspek strategis dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus proses kegiatan dalam Tahun 2024 adalah :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi:
 - Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (APBD)
 - Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (umkm):
 - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan(APBD)
 - Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal:
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
 - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sumber daya alam yang dipromosikan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka ada 6 (enam) sektor, yaitu:

1. Sektor Pariwisata.
2. Sektor Pertambangan dan Energi.
3. Sektor Kelautan dan Perikanan.
4. Sektor Industri (Industri Pengolahan Lada, Industri Pengolahan Karet, Industri Pengolahan Sawit, Industri Pengolahan Balok Timah dan Industri Pengolahan Kaolin).
5. Sektor Pertanian dan Peternakan.
6. Sektor Kehutanan dan Perkebunan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024. Hal ini berguna mengetahui tingkat pencapaian target kinerja yang lebih terukur serta keselarasan dengan Grand Strategy dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai bahan dan dokumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) OPD Tahun 2020 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 agar tercipta pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan informasi tentang kinerja yang dicapai oleh OPD.

LKIP Kabupaten Bangka ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026.

D. LANDASAN HUKUM

LAKIN Kabupaten Bangka ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIN TAHUN 2024

Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. MATRIK PENGUKURAN KINERJA
2. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DINPMP2KUKM Nomor 188.4/016/DINPMP2KUKM Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban BUPATI BANGKA terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);

6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten 2024-2026 adalah :

Tujuan : 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan

Sasaran : 1. Meningkatkan Penanaman Modal;

2. Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas;

3. Meningkatkan Kualitas UMKM;

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Adapun Sasaran penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan investasi dan potensi peluang investasi daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran yang dijalankan dengan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 3 (tiga) tahun mendatang;

- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

B. STRATEGI, KEBIJAKAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

- Strategi** : 1. Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik;
2. Penguatan Lembaga Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah serta Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat
- Kebijakan** : 1. Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online dan Menyederhanakan Jalur Birokrasi Perizinan dengan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM serta Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi.

Penetapan Indikator Kinerja Sasaran dan Program Pembangunan Daerah serta keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Realisasi Penanaman Modal;
2. Persentase Koperasi Yang Berkualitas;
3. Persentase Peningkatan UMKM Yang Berkualitas;
4. Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Program Pembangunan Daerah :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
5. Program Pengembangan UMKM;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
8. Program Promosi Penanaman Modal;
9. Program Pelayanan Penanaman Modal;
10. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
11. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Capaian Program :

1. Persentase Koperasi Aktif
2. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas
3. Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah
4. IKM Bidang Pelayanan Perizinan
5. Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka bahwa program yang menjadi acuan pada Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah, Kebijakan Umum adalah Membangun jaringan komunikasi perizinan investasi secara online adapun program-program acuan tersebut adalah :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 2) Program Promosi Penanaman Modal;
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 4) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- 7) Program Pengembangan UMKM.

Untuk melaksanakan program-program tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

C. OUTPUT/OUTCOME HASIL TAHUN 2024 YANG INGIN DICAPAI MENGACU KEPADA PERJANJIAN KINERJA YANG SUDAH DITETAPKAN DIAWAL TAHUN ANGGARAN 2024

Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melalui Kegiatan Tahun Anggaran 2024, yaitu :

- 1) Tertibnya Perizinan yang dikeluarkan dan Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional Perizinan.
- 2) Tertibnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik atau per semester oleh perusahaan PMDN/PMA melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 3) Meningkatnya jumlah koperasi dan minat para Usaha Kecil Menengah dalam mendirikan koperasi melalui kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.
- 4) Meningkatnya jumlah produk Usaha Kecil dan Menengah secara bertahap guna pengembangan kemampuan usaha kreatif masyarakat melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Berikut ini merupakan gambaran tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah pelayanan yang dilakukan pada OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-n				
				Tahun Awal (2023)	2024	2025	2026	Tahun Akhir (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Penanaman Modal	N/A	2.100 Milyar Rupiah	2.120 Milyar Rupiah	2.150 Milyar Rupiah	6.370 Milyar Rupiah
2.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	N/A	42,00	45,00	50,00	50,00
3.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	N/A	BB(78,00)	AA(81,00)	AA(84,00)	AA(84,00)
4.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas UMKM	Persentase Peningkatan UMKM Yang Berkualitas	N/A	67,00	68,00	69,00	69,00

D. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	-	Persentase Realisasi Investasi Daerah = Jumlah Realisasi Investasi/Jumlah Target Investasi x 100	Renstra DINPMP2KUKM Tahun 2024-2026
2	Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	-	Persentase Koperasi Aktif = (Jumlah Koperasi Aktif/Jumlah Koperasi Yang Terdaftar)x100	Renstra DINPMP2KUKM Tahun 2024-2026
3	Meningkatkan Kualitas UMKM	Persentase Peningkatan UMKM Yang Berkualitas	%	-	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas = Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas/Jumlah Seluruh Usaha Mikro x 100	Renstra DINPMP2KUKM Tahun 2024-2026
4.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	Renstra DINPMP2KUKM Tahun 2024-2026

E. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA OPD 2024

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2024-2026, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang sudah disusun dan ditandatangani oleh Kepala OPD bersama-sama dengan Bupati Bangka dalam perjalanannya mengalami perubahan dan telah dilakukan revisi untuk itu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2024 Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka telah menetapkan sasaran serta indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja SKPD
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	42,00	42,00
2	Meningkatkan Kualitas UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	67,00	67,00
3	Meningkatnya Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	2.100	2.100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori /Nilai	BB (78,00)	BB (78,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	8.000.000	4.726.300	APBD
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	3.000.000	700.000	APBD
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	281.346.300	281.346.300	APBD + DAK
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	305.512.300	291.412.300	APBD + DAK
5	Program Pengembangan UMKM	3.000.000	3.000.000	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.049.535.776	5.314.265.743	APBD
7	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.000.000	-	APBD
8	Program Promosi Penanaman Modal	10.000.000	4.043.670	APBD
9	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.412.065.406	2.360.064.380	APBD
10	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	615.478.000	615.478.000	DAK
11	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4.938.125	4.938.125	APBD
	TOTAL	9.697.875.907	8.879.974.818	

Besaran anggaran dalam Formulir Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertera diatas merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Guna penyelarasan terhadap hasil review RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 serta adanya Perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024, maka perlu dilakukan revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

dimana huruf E dijelaskan : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7

**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	42,00%
2	Meningkatnya kualitas umkm	Persentase peningkatan umkm yang berkualitas	67,00%
3	Meningkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi akip perangkat daerah	BB (78,00)
4	Meningkatnya penanaman modal	Jumlah realisasi penanaman modal	2.100 milyar rupiah

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2023.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2023 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	33.33	34.00	35.00	35.00	35.00
2	Meningkatkan Akuntabilitas DINPMP2KUKM	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUKM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat	Kategori	B	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya kualitas layanan DINPMP2KUKM	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

3	Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	%	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00
			Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (inputs), proses (process), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, bulan, hari dan sebagainya.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu juga metode yang dilakukan adalah membandingkan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Pengukuran prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$\begin{array}{l} \% \text{ Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$
--

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

% Pencapaian
Kinerja

=

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

x 100 %

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	70 < x < 85	Baik / Berhasil
3	55 < x < 70	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Sumber : Joko Widodo, 2001: *Good Governance*

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 4 (empat) sasaran utama yang mencakup 4 (empat) indikator kinerja setingkat *outcome* diperoleh hasil bahwa 4 (empat) indikator masuk dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil** yaitu 3 (tiga) indikator dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil** dengan nilai capaian diatas 85 % dan 1 (satu) indikator masuk dalam kategori **baik/berhasil** dengan nilai capaian dibawah 85 %. Indikator sasaran yang dipaparkan pada tabel berikut merupakan keseluruhan indikator pencapaian *Kinerja Sasaran* yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Indikator yang belum ditargetkan pencapaiannya atau belum diukur tingkat capaiannya yang ditandai dengan tanda *strip* (-) merupakan indikator-indikator yang belum diprioritaskan pada tahun 2024, oleh karena itu belum dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang indikator dimaksud, sebagaimana di rinci dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 merupakan gambaran Kinerja Tahun Pertama untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024. Rumusan Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil review terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Lebih lanjut Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Penanaman Modal
- 2. Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas
- 3. Meningkatkan Kualitas UMKM
- 4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Analisis Pembandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya Adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KET
1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	42,00	53,15	126,55	Sangat Baik/ Sangat Berhasil	Data Realisasi Bidang Koperasi dan UMKM
2.	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	%	67,00	77,00	114,92	Sangat Baik/ Sangat Berhasil	Data Realisasi Bidang Koperasi dan UMKM
3.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	2.100.000.000.000	7.523.831.086.753	358,28	Sangat Baik/ Sangat Berhasil	Realisasi s.d TW IV (TW IV datanya belum ada dari Kementerian)
4.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (78,00)	BB (70,14)	92,14	Sangat Baik/ Sangat Berhasil	LHE DINPMP2KUK M Tahun 2023 (LHE Tahun 2024 belum ada)
	Rata-Rata Capaian %				172,97	Sangat Baik/ Sangat Berhasil	

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran strategis "Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas melebihi target sebesar 126,55% sedangkan sasaran "Meningkatkan Kualitas UMKM" juga melebihi target yaitu sebesar 114,92%.Sasaran "Meningkatkan Penanaman Modal" melebihi target sebesar 358,28% sedangkan dari 4 Indikator Sasaran ada 1(satu) Indikator yang tidak melebihi target yaitu sasaran "Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari target BB (78,00) mencapai target BB (70,14) persentase sebesar 92,14 tetapi masuk dalam kategori "Sangat Baik". Secara rata-rata Pencapaian Target Tahun 2024 adalah sebesar 172,97% berada pada kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil.

b. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan capaian pada tahun sebelumnya, realisasi dan target jangka menengah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN 2022 S/D 2023 (%)
1.	Persentase Pelayanan Perizinan yang diselesaikan dengan Standar Waktu	%	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	Persentase Jumlah Investor	%	35,00	14,80	35,00	27,55
3.	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	A (81,00)	BB (70,14)	A (81,00)	89,14
4.	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang berklasifikasi A	%	76,10	53,63	76,10	61,22
	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	%	66,67	23,90	66,67	23,26
5.	Persediaan Ketersediaan Informasi Online dan Bahan Publikasi ke Publik	Aplikasi	2	2	2	100

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu.

Hambatan dalam pencapaian Sasaran 1 (satu) “Meningkatkan Penanaman Modal” :

- a. Pengurusan izin yang dilakukan oleh pihak pengusaha selalu terlambat dalam penyelesaian dikarenakan tidak lengkapnya berkas yang dilampirkan sehingga harus dikembalikan untuk dilengkapi.
- b. Adanya kelesuan ekonomi karena fluktuasi yang tidak menentu dari pasar, sehingga banyak usaha-usaha yang tidak memperpanjang izin atau vakum sementara.
- c. Tidak mencukupi anggaran survey lapangan yang dilakukan oleh tim teknis sehingga selalu menghambat penyelesaian izin yang tepat waktu.

- d. Sumber Daya Manajemen Aparatur yang terbatas dan belum memiliki kriteria (Tingkat Dasar, Lanjutan dan Sektoral).
- e. Perusahaan yang berinvestasi kurang sadar dengan kewajiban untuk melaporkan kemajuan realisasi investasi baik dilakukan secara online maupun offline secara berkala setiap tiga bulan sekali selama masa pembangunan dan setiap enam bulan sekali setiap tahunnya pada masa investasi berjalan/berproduksi.
- f. Adanya sistem baru yang digunakan dalam proses penyelesaian perizinan.

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

- Memberikan pemahaman kepada pihak pengusaha yang akan mengurus izin tentang kelengkapan dokumen yang diperlukan. Sehingga tidak menghambat dalam proses penyelesaian perizinan.
- Menyediakan anggaran yang memadai dalam memperlancar survey yang ada dilapangan sehingga tidak menghambat dalam penyelesaian proses perizinan.
- Menyediakan anggaran pelatihan yang dikhususkan dalam meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan.
- Memberikan pemahaman agar setiap perusahaan yang berinvestasi selalu mentaati aturan yang sudah disepakati untuk selalu menyampaikan LKMP tepat waktu.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan petugas yang melayani perizinan.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran 1 (Satu) ini didukung oleh 5 (lima) Program yaitu : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan laporan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2024 diketahui bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 93,99 persen, hal ini dipandang cukup efisien dalam penggunaan sumber daya.

- a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian Kinerja Sasaran I (Satu) "Meningkatkan Penanaman Modal" yang Sasaran Programnya yaitu untuk Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Meningkatnya Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal ditunjang dengan Program Promosi Penanaman Modal dengan 1 (Satu) kegiatan, Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 2 (Dua) Kegiatan, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan 3 (Tiga) Kegiatan dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan 1 (Satu) Kegiatan. Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA 1 (SATU) “MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL”								
Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan %	Fisik %
1		2		3	4	5	6	7
1	Program Promosi Penanaman Modal	Input	Dana Tersedia	Rupiah	4.043.670,00	3.985.000,00	98,55	100
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	
		Out come	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota menggunakan sistem aplikasi	Dokumen	1	1	100	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Input	Dana Tersedia	Rupiah	2.360.064.380,00	2.208.884.359,82	93,59	98,69
		Output	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.000	7.395	100	
		Out come	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.000	7.395	100	
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Input	Dana Tersedia	Rupiah	615.478.000,00	557.418.770,00	89,86	100
		Output	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	10	10	100	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	264	286	100	

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA 1 (SATU) “MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL”								
Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan %	Fisik %
1		2		3	4	5	6	7
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan;serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	50	120	100	
		Out come	Terselesaikannya Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	10	10	100	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	265	286	100	
			Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	50	120	100	
4	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Input	Dana Tersedia	Rupiah	4.938.125,00	4.224.750,00	85,55	100
		Output	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	6	6	100	
		Out come	Tersedianya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	6	6	100	
	JUMLAH				2.984.524.175,00	2.774.512.879,82	92,96	100

Pencapaian Kinerja Sasaran 2 (dua) ” Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas” yang Sasaran Programnya antara lain untuk Meningkatnya Koperasi Aktif, Meningkatnya Koperasi Sehat, Meningkatnya Pemberdayaan UMKM dan Meningkatnya Usaha Mikro yang berdaya saing ditunjang dengan Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan 1 (Satu) kegiatan, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan 1 (Satu) kegiatan, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan 1 (Satu) Kegiatan dan Program Pengembangan UMKM dengan 1 (Satu) Kegiatan.Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA 2 (DUA) “MENINGKATKAN KOPERASI YANG BERKUALITAS”								
Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan %	Fisik %
1		2		3	4	5	6	7
1.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Input	Dana Tersedia	Rupiah	4.726.300,00	4.555.000,00	96,37	100
		Output	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	Unit Usaha	20	3	100	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	100	15	96,13	
		Outcome	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	20	3	100	
			Terlaksanakannya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Unit Usaha	100	15	96,13	
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Input	Dana Tersedia	Rupiah	700.000,00	600.000,00	85,71	100
		Output	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	20	2	85,71	
		Outcome	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit usaha	20	2	85,71	

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA 2 (DUA) “MENINGKATKAN KOPERASI YANG BERKUALITAS”								
Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan %	Fisik %
1		2		3	4	5	6	7
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Input	Dana Tersedia	Rupiah	281.346.300,00	266.190.997,00	94,61	99,45
		Output	Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	70 Orang	68 Orang	94,61	
		Outcome	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Orang	70 Orang	68 Orang	94,61	
JUMLAH					286.772.600,00	271.345.997,00	94,62	100

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran ”Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah” secara rata-rata sebesar 100 % berada pada kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Dari 4 (empat) indikator yang diukur, keempat indikator tersebut tingkat capaiannya dibawah 100 %. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2024 sebesar 94,62 %.Terdapat 3 (tiga) Indikator Program dari 4(empat) Indikator Program yang tidak mencapai target kinerja dikarenakan keterbatasan anggaran dikarenakan anggaran di rasionalisasi atau refocusing tetapi capaian keuangannya dibawah 100%.Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka capaian masing-masing indikator yang menggambarkan kinerja sasaran.Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu. Hambatan dalam pencapaian sasaran :

- a. Kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi yang masih berkreteria aktif dan sehat hal ini dikarenakan tersebarnya koperasi-koperasi tersebut di 8 (delapan) kecamatan dikarenakan anggaran yang dirasionalisasi sehingga tidak maksimal.
- b. Dukungan anggaran yang tidak memadai untuk melakukan pembinaan koperasi dilapangan.

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

- Menyediakan anggaran yang memadai karena kekurangan anggaran yang ada merupakan hal penentu dalam menjaga agar koperasi tetap aktif dan sehat ini dilakukan dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tersebar tersebut.
- Menyediakan anggaran yang memadai dalam memperlancar Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi.

Pencapaian Kinerja Sasaran 3 (tiga) ” Meningkatkan Kualitas UMKM” yang Sasaran Programnya antara lain untuk Meningkatkan Pemberdayaan UMKM dan Meningkatkan Usaha Mikro yang berdaya saing ditunjang dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan 1 (satu) kegiatan dan Program Pengembangan UMKM dengan 1 (Satu) kegiatan.Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA 3 (TIGA) “MENINGKATKAN KUALITAS UMKM”								
Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan %	Fisik %
1		2		3	4	5	6	7
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Input	Dana Tersedia	Rupiah	291.412.300,00	256.849.417,00	83,61	100
		Output	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	5	14	79,11	
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	1	1	83,54	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	60	68	88,19	
		Outcome	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	5	14	79,11	
			Terlaksananya Pemulihan Usaha Mikro	Unit Usaha	1	1	83,54	
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	68	88,19	
2	Program Pengembangan UMKM	Input	Dana Tersedia	Rupiah	3.000.000,00	2.390.000,00	79,67	100
		Output	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	84	80	79,67	
		Outcome	Meningkatnya Pengembangan UMKM	Unit usaha	84	80	79,67	
	JUMLAH				294.412.300,00	259.239.417,00	88,05	100

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran ” Meningkatkan Kualitas UMKM” secara rata-rata sebesar 88,05 % berada pada kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil. Dari 4 (empat) indikator yang diukur, keempat indikator tersebut tingkat capaiannya dibawah 100 %. Maka tingkat efektivitas yang bisa dicapai tahun 2024 sebesar 88,05 %. Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu. Hambatan dalam pencapaian sasaran :

- a. Usaha Kecil Menengah yang ada banyak yang tidak memiliki izin usaha yang di persyaratkan sehingga tidak terdaftar di data Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ketika akan dilakukan verifikasi untuk melakukan peningkatan status usaha (Mikro, Kecil dan Menengah maupun Besar).
- b. Dukungan anggaran yang tidak memadai untuk melakukan memfasilitasi dan meningkatkan pengembangan UMKM.

Strategi/ Solusi pemecahan masalah :

- Menyediakan anggaran yang memadai karena kekurangan anggaran yang ada merupakan hal penentu dalam menjaga agar dapat memfasilitasi usaha mikro untuk melaksanakan kemitraan usaha mikro untuk pengembangan UMKM.
- Menyediakan anggaran yang memadai dalam meningkatnya pemahaman dan pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan secara Optimal.

Pencapaian Kinerja Sasaran 4 (empat) ” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” yang Sasaran Programnya antara lain untuk Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah dan Meningkatnya Ketersediaan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 7 (tujuh) kegiatan. Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA 4 (EMPAT) “MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH”								
Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan %	Fisik %
1		2		3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input	Dana Tersedia	Rupiah	5.314.265.743,00	5.050.407.560,00	95,03	100
		Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	Dokumen	8	12	59,94	

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	6	98,04
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	36	97,75
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	2	2	99,57
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	-	-
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	96,93
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	99,51
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	99,89
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	94,75
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	57,09

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	95,68	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	14	87,40	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	96,92	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	1	-	-	
		Outcome	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	12	59,94	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	6	98,04	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	36	97,75	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2	99,57	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	-	-	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	1	-	-	
			Terlaksananya	Laporan	12	12	96,93	

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	99,51	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1	99,89	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	94,75	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	57,09	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	95,68	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	18	14	87,40	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20	20	96,92	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	-	-	
	JUMLAH				5.314.265.743,00	5.050.407.560,00	95,03	100

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran ” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” secara rata-rata sebesar 95,03 % berada pada kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil. Dari 15 (lima belas) indikator yang diukur, kelima belas indikator tersebut tingkat capaiannya dibawah 100 %. Terdapat 2 (dua) Indikator sasaran yang Sedang/Cukup Berhasil yaitu Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun dengan capaian keuangannya sebesar 59.94% tetapi capaian kinerjanya melebihi target dan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebesar 57,09% tetapi capaian kinerjanya tercapai. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2024 sebesar 95,03 %. Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu. Hambatan dalam pencapaian sasaran : Tidak tercapainya sasaran indikator yang sudah ditetapkan.Adapun Strategi/Solusi pemecahan masalah: Melaksanakan Target dengan komitmen Bidang-bidang yang ada.

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2024

TAHUN	TARGET BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI SASARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)	EFISIENSI (%)
2023	8.889.924.818,00	8.355.505.853,82	93,99	6,01

Berdasarkan tabel diatas Tingkat Efisiensi terhadap Capaian Sasaran Kinerja secara rata-rata sebesar 93,99 % berada pada kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil. Dari 4 (empat) Indikator Strategis yang diukur, keempat Indikator Strategis tersebut tingkat capaiannya dibawah 100 %. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2024 sebesar 93,99 % dengan Efisiensi Anggaran sebesar 6,01%

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk tahun anggaran 2024 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Operasi
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Modal

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

I. Realisasi Anggaran Belanja Operasi

Realisasi anggaran Belanja Operasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.780.341.433,00 atau 76,35% dari dana yang tersedia dalam DPA dan DPPA sebesar Rp. 8.879.974.818,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa dengan sisa anggaran sebesar Rp.410.368.605,00 dengan rincian sebagai berikut :

KOMPONEN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
		Realisasi	%	
1	2	3	4	5
BELANJA OPERASI	6.780.341.433,00	6.369.972.848,00	93,95	410.368.605,00

II. Realisasi Anggaran Belanja Modal

Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.099.633.385,00 atau 23,64 % dari dana yang tersedia dalam DPA dan DPPA sebesar Rp. 8.879.974.818,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 114.100.379,18.Adapun rincian berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

KOMPONEN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
		Realisasi	%	
1	2	3	4	5
BELANJA MODAL	2.099.633.385,00	1.985.533.005,82	94,56	114.100.379,18

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal pengembangan perencanaan strategis (Renstra). Pada dasarnya keberhasilan atau kegagalan dari seorang Pimpinan OPD sangat ditentukan oleh ketersediaan dari sumber daya yang ada, terutama sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. Dan pada hakekatnya keberadaan suatu organisasi semestinya harus standar, yang artinya harus dapat melaksanakan kinerja dengan baik. Oleh karena itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan SDM yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta ketersediaan anggaran harus dapat memposisikan suatu OPD untuk dapat bekerja dengan produktif, efektif dan efisien.

Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melalui Kegiatan Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Tertibnya Perizinan yang dikeluarkan dan Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional Perizinan.
2. Tertibnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik atau per semester oleh perusahaan PMDN/PMA melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Tersebar nya data dan informasi hasil-hasil pembangunan serta potensi daerah kepada masyarakat melalui kegiatan Pameran pembangunan Daerah.
4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang lebih berkompeten melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Tersebar nya informasi tentang potensi daerah dan peluang investasi kepada Investor melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.
6. Terlaksananya pembinaan koperasi agar tetap aktif dan sehat melalui Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.
7. Terlaksananya pembinaan usaha kecil dan menengah yang memiliki izin dan meningkatkan status usaha yang ada menjadi usaha yang berdaya saing melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

B. HAMBATAN KENDALA

1. *Permasalahan Di Bidang Ketatalaksanaan*

Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka, namun dalam Peraturan Bupati tersebut masih belum semua dilimpahkan dan masih ada beberapa perizinan yang masih dilakukan oleh Dinas Teknis.

2. *Permasalahan Di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur*

- Sumber Daya Aparatur setingkat Pelaksana/Staf belum optimal dalam pemanfaatan kemampuan kompetensinya, dengan konsekuensi atas masalah tersebut menyebabkan pencapaian target kinerja tidak optimal. Hal ini dikarenakan hanya tertumpu pada satu orang.
- Masih adanya kompetensi Sumber Daya Aparatur setingkat pejabat struktural yang belum optimal pemberdayaannya, sehingga pelaksanaan fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penguatan kelembagaan tidak berjalan efektif dalam upaya mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik.
- Masih rendahnya Etos Kerja Sumber Daya Aparatur yang ada.

C. PEMECAHAN MASALAH

Kebijakan yang diambil guna mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Bidang Ketatalaksanaan

Melaksanakan rapat-rapat koordinasi antar instansi teknis khususnya dalam setiap penyusunan draf aturan-aturan yang berhubungan dengan perizinan maupun langkah-langkah penerbitan perizinan yang melibatkan lintas sektoral.

2. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

- Memberdayakan Sumber Daya Aparatur Setingkat Pelaksana/Staf atau melakukan rotasi terhadap staf yang kurang optimal, dengan bantuan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- Melakukan evaluasi setiap bulannya guna mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan perbidangnya.
- Khusus setingkat pejabat struktural agar melakukan evaluasi dan membuat suatu rasume baik berupa perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan disetiap bidangnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai target 42.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai target 67.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai target 2.100 Milyar Rupiah
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai target BB (78.00)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.889.924.818,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.355.505.853,82 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 534.418.964,18,00.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka 2019 - 2023 menetapkan sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja tersebut telah

dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari tiga tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai target 42.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai target 67.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai target 2.100 Milyar Rupiah
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai target BB (78.00)

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 8.889.924.818,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka adalah 93,99 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bangka.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB.BANGKA

BULAN : DESEMBER 2024

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK				PELAKSANA	LOKASI				SISA DANA	KET
				NILAI	NOMOR	MULAI	SELESAI			FISIK (%)	KEUANGAN	KEU (%)		
					TANGGAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2.17.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	300.000,00							100,00	300.000,00	100,00	-	
	5.101.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-							0,00	-	-	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-							0,00	-	-	-	
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-							0,00	-	-	-	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-							0,00			-	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00							100,00	300.000,00	100,00	-	
2	2.17.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	4.426.300,00							100,00	4.255.000,00	96,13	171.300,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	150.000,00							0,00	-		150.000,00	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-							0,00	-		-	
	5.1.03.04.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-							0,00	-		-	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.236.300,00							100,00	1.230.000,00	99,49	6.300,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.040.000,00							100,00	3.025.000,00	99,51	15.000,00	
3	2.17.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	700.000,00							100,00	600.000,00	85,71	100.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	-							0,00	-	-	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-							0,00	-	-	-	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00							100,00	600.000,00	85,71	100.000,00	
4	2.1.17.05.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM Koperasi	281.346.300,00							100,00	266.190.997,00	94,61	15.155.303,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	245.000,00							100,00	245.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.800.550,00							100,00	1.476.000,00	81,97	324.550,00	
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	414.750,00							0,00	400.000,00	-	14.750,00	
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.480.000,00							96,00	6.800.000,00	90,91	680.000,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.540.000,00							98,00	48.392.000,00	97,68	1.148.000,00	
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	29.400.000,00							0,00	29.400.000,00	-	-	
	5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.000.000,00							100,00	35.000.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa hotel	37.835.000,00							100,00	37.835.000,00	100,00	-	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.036.610,00							100,00	14.492.997,00	85,07	2.543.613,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.000.000,00							100,00	23.800.000,00	70,00	10.200.000,00	
	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya	51.000.000,00							100,00	51.000.000,00	100,00	-	
	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.094.390,00							100,00	4.950.000,00	97,17	144.390,00	
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.500.000,00							100,00	12.400.000,00	99,20	100.000,00	

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK				PELAKSANA	LOKASI				SISA DANA	KET
				NILAI	NOMOR	MULAI	SELESAI			FISIK (%)	KEUANGAN	KEU (%)		
					TANGGAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2.17.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	790.000,00							100,00	625.000,00	79,11	165.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	150.000,00							0,00	-	-	150.000,00	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-							0,00	-	-	-	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	640.000,00							100,00	625.000,00	97,66	15.000,00	
6	2.17.07.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro	1.610.000,00							0,00	1.345.000,00	83,54	265.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	150.000,00							0,00	-	-	150.000,00	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	820.000,00							100,00	820.000,00	100,00	-	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	640.000,00							100,00	525.000,00	82,03	115.000,00	
7	2.17.07.2.01.0015	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	289.012.300,00							100,00	254.879.417,00	88,19	34.132.883,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	245.000,00							100,00	245.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.218.400,00							100,00	21.218.400,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.957.050,00							100,00	1.866.720,00	95,38	90.330,00	
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	414.750,00							100,00	400.000,00	96,44	14.750,00	
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.740.000,00							100,00	3.230.000,00	86,36	510.000,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.570.000,00							100,00	41.586.000,00	97,69	984.000,00	
	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	68.400.000,00							100,00	68.400.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.02.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.200.000,00							100,00	25.200.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00							0,00	-	-	2.400.000,00	
	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	92.304,00							100,00	61.536,00	66,67	30.768,00	
	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.307.696,00							100,00	1.538.464,00	66,67	769.232,00	
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00							100,00	30.000.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	31.230.000,00							0,00	31.230.000,00	-	-	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.773.100,00							100,00	6.953.297,00	37,04	11.819.803,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.800.000,00							100,00	20.400.000,00	53,97	17.400.000,00	
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-							0,00			-	
	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Pesonal Komputer	2.664.000,00							100,00	2.550.000,00		114.000,00	
8	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	3.000.000,00							0,00	2.390.000,00	79,67	610.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	150.000,00							0,00	-	-	150.000,00	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.000,00							0,00			150.000,00	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.650.000,00							100,00	1.640.000,00	99,39	10.000,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000,00							100,00	750.000,00		300.000,00	
9	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.609.200,00							0,00	1.564.000,00	59,94	1.045.200,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	450.000,00							0,00	450.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.157.500,00							100,00	150.000,00	12,96	1.007.500,00	
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.001.700,00							100,00	964.000,00	96,24	37.700,00	

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK				PELAKSANA	LOKASI				SISA DANA	KET
				NILAI	NOMOR	MULAI	SELESAI			FISIK (%)	KEUANGAN	KEU (%)		
					TANGGAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.991.000,00							0,00	8.815.000,00	98,04	176.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	450.000,00							100,00	450.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	126.000,00							0,00	-	-	126.000,00	
	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	8.415.000,00							100,00	8.365.000,00	99,41	50.000,00	
11	2.18.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.072.702.380,00							100,00	3.981.101.356,00	97,75	91.601.024,00	
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.891.883.040,00							100,00	1.872.823.082,00	98,99	19.059.958,00	
	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	150.401.486,00							100,00	150.332.086,00	99,95	69.400,00	
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	178.848.016,00							100,00	177.718.522,00	99,37	1.129.494,00	
	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	20.185.342,00							100,00	20.149.486,00	99,82	35.856,00	
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.990.000,00							100,00	150.030.000,00	98,71	1.960.000,00	
	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tujangan Fungsional PNS	260.203.160,00							100,00	258.003.160,00	99,15	2.200.000,00	
	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	25.080.000,00							100,00	25.020.000,00	99,76	60.000,00	
	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.560.000,00							100,00	28.180.000,00	98,67	380.000,00	
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	96.753.120,00							100,00	96.173.760,00	99,40	579.360,00	
	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.694.140,00							100,00	12.601.080,00	99,27	93.060,00	
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjagan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.927.722,00							100,00	34.035.864,00	94,73	1.891.858,00	
	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjagan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	897.136,00							100,00	745.107,00	83,05	152.029,00	
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	108.325,00							100,00	29.947,00	27,65	78.378,00	
	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.103,00							100,00	2.159,00	26,64	5.944,00	
	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	164.285.711,00							100,00	114.661.854,00	69,79	49.623.857,00	
	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	14.001.352,00							100,00	7.504.676,00	53,60	6.496.676,00	
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.035.655,00							100,00	3.842.551,00	95,22	193.104,00	
	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	332.680,00							100,00	314.680,00	94,59	18.000,00	
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.934.925,00							100,00	11.527.750,00	96,59	407.175,00	
	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPK	993.999,00							100,00	943.999,00	94,97	50.000,00	
	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	86.100,00							100,00	-	-	86.100,00	
	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	264.800,00							100,00	-	-	264.800,00	
	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Pengasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	20.900.000,00							100,00	20.862.950,00	99,82	37.050,00	
	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.002.327.568,00							100,00	995.598.643,00	99,33	6.728.925,00	
12	2.18.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD	-							0,00	-	-	-	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	-							0,00	-	-	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-							0,00	-	-	-	
13	2.18..01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9.732.000,00							100,00	9.690.000,00	99,57	- 42.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	300.000,00							100,00	300.000,00	0,00	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-							0,00	-	0,00	-	
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.617.000,00							100,00	1.610.000,00	99,57	- 7.000,00	
	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.815.000,00							100,00	7.780.000,00	0,00	- 35.000,00	

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK				PELAKSANA	LOKASI				SISA DANA	KET
				NILAI	NOMOR	MULAI	SELESAI			FISIK (%)	KEUANGAN	KEU (%)		
					TANGGAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2.18.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.250.000,00							0,00	-	-	9.250.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	450.000,00							0,00	-	-	450.000,00	
	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	8.800.000,00							0,00	-	-	8.800.000,00	
15	2.18.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.450.000,00							0,00	-	-	6.450.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	450.000,00							0,00	-		450.000,00	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00							0,00	-	-	6.000.000,00	
16	2.18.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.965.207,00							0,00	160.878.302,00	96,93	5.086.905,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pngelola Keuangan	690.000,00							100,00	690.000,00		-	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.440.000,00							100,00	5.940.000,00	56,90	4.500.000,00	
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00							100,00	4.547.500,00	90,95	452.500,00	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141.744.378,00							100,00	141.710.802,00	99,98	33.576,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.090.829,00							100,00	7.990.000,00	98,75	100.829,00	
17	2.18.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.290.613,00							100,00	26.162.200,00	99,51	128.413,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	450.000,00							100,00	450.000,00	100,00	-	
	5.1.02..01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.568.405,00							100,00	2.540.000,00	98,89	28.405,00	
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.225.000,00							100,00	20.225.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.847.208,00							100,00	1.747.200,00	94,59	100.008,00	
	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	46.152,00							100,00	46.152,00	100,00	-	
	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	1.153.848,00							100,00	1.153.848,00	100,00	-	
18	2.18.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-							0,00	-		-	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	-							0,00	-	-	-	
	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-							0,00	-	-	-	
19	2.18.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.345.730,00							100,00	5.340.000,00	99,89	5.730,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	450.000,00							100,00	450.000,00	100,00	-	
	5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.895.730,00							100,00	4.890.000,00	99,88	5.730,00	
20	2.18.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	586.742.229,00							100,00	555.955.150,00	94,75	30.787.079,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	840.000,00							100,00	840.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.025.495,00							100,00	17.381.850,00	75,49	5.643.645,00	
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11.695.950,00							100,00	6.000.000,00	51,30	5.695.950,00	
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000,00							100,00	400.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.520.000,00							100,00	2.500.000,00	99,21	20.000,00	
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	222.475.000,00							100,00	218.250.000,00	98,10	4.225.000,00	
	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	202.250.000,00							100,00	202.250.000,00	100,00	-	

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK				PELAKSANA	LOKASI				SISA DANA	KET
				NILAI	NOMOR	MULAI	SELESAI			FISIK (%)	KEUANGAN	KEU (%)		
					TANGGAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	20.225.000,00							100,00	20.225.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	20.225.000,00							100,00	20.225.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.000.000,00							100,00	1.080.000,00	8,31	11.920.000,00	
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	42.485.784,00							100,00	39.603.300,00	93,22	2.882.484,00	
	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.061.496,00							100,00	1.046.112,00	98,55	15.384,00	
	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.538.504,00							100,00	26.153.888,00	98,55	384.616,00	
21	2.18.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	202.956.945,00							100,00	115.859.171,00	57,09	87.097.774,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	690.000,00							100,00	690.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	2.020.200,00							100,00	1.920.000,00	95,04	100.200,00	
	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.000.000,00							100,00	14.416.140,00	80,09	3.583.860,00	
	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	156.246.745,00							100,00	75.350.148,00	48,23	80.896.597,00	
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.000.000,00							100,00	23.482.883,00	90,32	2.517.117,00	
22	2.18.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.847.623,00							100,00	27.602.200,00	95,68	1.245.423,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	450.000,00							100,00	450.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Prabot Kantor	1.882.259,00							100,00	1.780.000,00	94,57	102.259,00	
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.225.000,00							100,00	20.225.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.243.156,00							100,00	2.200.000,00	67,84	1.043.156,00	
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Kesehatan bagi Non ASN	1.847.208,00							100,00	1.747.200,00	94,59	100.008,00	
	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	46.152,00							100,00	46.152,00	100,00	-	
	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.153.848,00							100,00	1.153.848,00	100,00	-	
23	2.18.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.132.816,00							100,00	137.330.181,00	87,40	19.802.635,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	690.000,00							100,00	690.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	42.350.000,00							100,00	42.350.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.694.416,00							100,00	3.494.400,00	94,59	200.016,00	
	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kerja bagi Non ASN	92.304,00							100,00	92.304,00	100,00	-	
	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.307.696,00							100,00	2.307.696,00	100,00	-	
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.600.000,00							100,00	30.529.174,00	99,77	70.826,00	
	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	53.200.000,00							100,00	52.685.027,00	99,03	514.973,00	
	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua	24.198.400,00							16,63	5.181.580,00	21,41	19.016.820,00	
24	2.18.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.750.000,00							100,00	20.110.000,00	96,92	640.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	450.000,00							100,00	450.000,00	100,00	-	
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00							100,00	5.590.000,00	-	510.000,00	
	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.200.000,00							100,00	14.070.000,00	99,08	130.000,00	

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK				PELAKSANA	LOKASI				SISA DANA	KET
				NILAI	NOMOR	MULAI	SELESAI			FISIK (%)	KEUANGAN	KEU (%)		
					TANGGAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	2.18.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.450.000,00							0,00	-	-	20.450.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	450.000,00							0,00	-	-	450.000,00	
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00							0,00	-	-	20.000.000,00	
26	2.18.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-							0,00	-	-	-	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	-							0,00			-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-							0,00	-	-	-	
27	2.18.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4.043.670,00							100,00	3.985.000,00	98,55	58.670,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000,00							0,00	300.000,00		-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	303.200,00							100,00	285.000,00	94,00	18.200,00	
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	445.410,00							100,00	420.000,00		25.410,00	
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	795.060,00							100,00	780.000,00	98,11	15.060,00	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.200.000,00							100,00	2.200.000,00	100,00	-	
28	2.18.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Sistem Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.360.064.380,00							0,00	2.208.884.359,82	93,59	151.180.020,18	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Tulis Untuk Kagiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.093.900,00							100,00	12.616.000,00	66,07	6.477.900,00	
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Tulis Untuk Kagiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.295.000,00							100,00	8.000.000,00	96,44	295.000,00	
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Tulis Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.016.910,00							100,00	24.520.000,00	94,25	1.496.910,00	
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Tulis Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.323.773,00							100,00	14.649.000,00	95,60	674.773,00	
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Tulis Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.149.940,00							100,00	13.425.000,00	94,88	724.940,00	
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Tulis Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.442.000,00							100,00	8.440.000,00	99,98	2.000,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.500.000,00							100,00	13.500.000,00	93,10	1.000.000,00	
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Jamuan Tamu	14.000.000,00							0,00	6.787.500,00	48,48	7.212.500,00	
	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.500.000,00							100,00	2.250.000,00	16,67	11.250.000,00	
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.875.000,00							100,00	26.875.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.000.000,00							0,00	-	-	5.000.000,00	
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.847.208,00							100,00	1.747.200,00	94,59	100.008,00	
	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	46.152,00							100,00	46.152,00	100,00	-	
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.153.848,00							100,00	1.153.848,00	100,00	-	
	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-							0,00	-	-	-	
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00							0,00	5.580.000,00	91,48	520.000,00	
	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.100.000,00							0,00	6.425.000,00	90,49	675.000,00	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.141.384,00							98,65	98.626.654,00	99,48	514.730,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00							70,00	3.500.000,00	70,00	1.500.000,00	
	5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-							0,00			-	

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK				PELAKSANA	LOKASI				SISA DANA	KET
				NILAI	NOMOR	MULAI	SELESAI			FISIK (%)	KEUANGAN	KEU (%)		
					TANGGAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.604.250,00							100,00	4.600.000,00	99,91	4.250,00	
	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	50.000.800,00							100,00	40.800.000,00	81,60	9.200.800,00	
	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	449.765.150,00							100,00	440.700.000,00	97,98	9.065.150,00	
	5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	365.000,00							100,00	360.000,00	98,63	5.000,00	
	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	283.627.800,00							100,00	280.375.000,00	98,85	3.252.800,00	
	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.215.780,00							100,00	28.400.000,00	76,31	8.815.780,00	
	5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8.495.235,00							100,00	8.400.000,00	98,88	95.235,00	
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	288.430.000,00							100,00	287.050.000,00	99,52	1.380.000,00	
	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	31.806.600,00							100,00	31.000.000,00	97,46	806.600,00	
	5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	900.370.000,00			19 agustus 2024	17-Nov-24	19 agustus - 17 november		100,00	819.356.005,82	91,00	81.013.994,18	
	5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	19.798.650,00							0,00	19.702.000,00	99,51	96.650,00	
29	2.18.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-							0,00	-	-	-	
	5.1.02.04.01.0001	BelanjaPerjalanan Dinas Biasa	-							0,00	-	-	-	
30	2.18.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	92.321.000,00							0,00	87.322.640,00	94,59	4.998.360,00	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.749.000,00							100,00	3.579.840,00	-	169.160,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.764.000,00							100,00	37.080.000,00		2.684.000,00	
	5.1.02.02.01.0003	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.600.000,00								3.600.000,00		-	
	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.000.000,00							100,00	20.512.800,00		487.200,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.208.000,00							100,00	22.550.000,00	93,15	1.658.000,00	
31	2.18.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	338.514.000,00							0,00	323.364.450,00	95,52	15.149.550,00	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.376.500,00							100,00	8.020.640,00		355.860,00	
	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	102.087.700,00							100,00	100.317.360,00	98,27	1.770.340,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.634.000,00							100,00	112.022.000,00	92,86	8.612.000,00	
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia	47.000.000,00							100,00	47.000.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	47.320.000,00							100,00	45.480.227,00	96,11	1.839.773,00	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.015.800,00							100,00	8.524.223,00	85,11	1.491.577,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.080.000,00							100,00	2.000.000,00	64,94	1.080.000,00	
32	2.18.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	184.643.000,00							0,00	146.731.680,00	79,47	37.911.320,00	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.183.000,00							100,00	2.095.680,00	96,00	87.320,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.660.000,00							100,00	13.824.000,00	88,28	1.836.000,00	
	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	90.000.000,00							100,00	87.912.000,00	97,68	2.088.000,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.800.000,00							50,00	42.900.000,00	55,86	33.900.000,00	

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK				PELAKSANA	LOKASI				SISA DANA	KET
				NILAI	NOMOR	MULAI	SELESAI			FISIK (%)	KEUANGAN	KEU (%)		
					TANGGAL									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	2.18.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4.938.125,00							0,00	4.224.750,00	85,55	713.375,00	
	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	150.000,00							0,00	-	-	150.000,00	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.447.675,00								1.949.750,00	79,66	497.925,00	
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	954.450,00								900.000,00	94,30	54.450,00	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.386.000,00							100,00	1.375.000,00	99,21	11.000,00	
TOTAL JUMLAH			8.889.924.818,00								8.355.505.853,82	93,99	534.418.964,18	

Sunggailiat, 03 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, OPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,



DIAN ERANDY, SE
197012182008041001

REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	BB (78.00)	BB (77,14)	92
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	26.12	26.12	100
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	10.25	10.25	100
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persentase	0.00	0.00	0
		Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	64.12	64.12	100
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks	3.50	3.50	100
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Indeks	75.00	75.00	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persentase	100	100	100
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persentase	100	100	100

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	8	12	150
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	6	150
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar (%)	Persentase	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	38	36	95
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	14	14	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	Persentase	100	100	100
		Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	27.78	0.00	0

	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	0	0
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	5.35	5.35	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	1	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	Persentase	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persentase	75.00	75.00	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	14	78
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0
		Menigkatnya Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	2,100,000,000,000	3,045,652,559,652	145
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah	Persentase Potensi Peluang Investasi	Persentase	45.00	45.00	100
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0.00	0

	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya kepatuhan terhadap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	0.00	0
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah	Persentase Promosi Penanaman Modal	Persentase	100	0.00	0
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Promosi Investasi Daerah	Jumlah Promosi Investasi Daerah	Kali	2	0.00	0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM Bidang Pelayanan	Nilai	89.00	89.00	100
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan yang diselesaikan sesuai standar waktu	Persentase	100	100	100
		Meningkatkan Kenyamanan dalam Pelayanan/Non Perizinan	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100

	Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Teintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektornik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1000	7395	740
	Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memeperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	48	0	0
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah	Persentase	150.00	150.00	100
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Investasi Daerah</i>	<i>Persentase LKPM yang diselesaikan</i>	<i>Persentase</i>	<i>80.00</i>	<i>80.00</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terselesaikan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	10	10	100

	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	264	286	108
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan Usaha	50	120	240
III.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Menigkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi Penanaman Modal yang dikelola	Persentase	100	100	100
	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota</i>	<i>Tersedianya Informasi Online</i>	<i>Persentase Ketersediaan Informasi Online</i>	Persentase	100	100	100
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektornik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektornik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	6	6	100

	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persentase	42.00	53.15	127
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Persentase	47.39	47.39	100
	sub kegiatan penguatan tata kelola kelembagaan	terlaksananya penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Unit Usaha	20	3	15
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Unit Usaha	100	15	15
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Persentase	42.00	53.15	127
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi	Persentase koperasi KSP/USP yang dilakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi	Persentase	87.50	87.5	100

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit Usaha	20	2	10
IV.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Persentase SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	unit usaha	1.38	1.38	100
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah SDM Koperasi yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi	persentase SDM Koperasi yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi	persentase	100	100	100
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian</i>	<i>Orang</i>	<i>70</i>	<i>68</i>	<i>97</i>
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM yang mendapatkan kemudahan berusaha	Persentase	3.04	3.04	100
	Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Unit Usaha	3.04	3.04	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	5	14	280

	Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro	Terlaksananya Pemulihan Usaha Mikro	Jumlag Usaha Mikro yag Terfasilitasi	Unit Usaha	1	1	100
	Sub Kegiatan Pemahaman dna Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM dan UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	60	68	113
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro dan Omset UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persentase	15.19	15.19	100
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Modal Usaha dan Omset UMKM	Persentase Modal Usaha dan Omset UMKM yang meningkat	Persentase	67.00	77.00	115
	Sub Kegiatan Pengembangan	Meningkatnya Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	84	80	95

Sunggailiat, 10 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



Dian Firnandy, SE
NIP. 19791218 200804 1 001